

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DI DESA HARJOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

Vicky Allisonia Luckytasari¹, Akbar Maulana²

¹Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

vickyallisonia@gmail.com

akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

*vickyallisonia@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. RKPDDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa serta analisis kebutuhan dan potensi desa. Desa Harjomulyo merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember dan masih terdapat pembangunan desa yang belum terealisasi sehingga menghambat aktifitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan RKP desa Harjomulyo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya membangun dan merawat fasilitas desa turut menjadi kendala dalam mewujudkan desa yang lebih maju. Keterbatasan pembangunan infrastruktur juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang memengaruhi.

Kata Kunci : Implementasi; RKPDDes ; Pembangunan Desa

ABSTRACT

Village Government Work Plan (RKPDDes) is a planning document that contains programs and activities that will be implemented by the village government within a certain period, usually one budget year. RKPDDes are prepared based on the results of village deliberations as well as analysis of village needs and potential. Harjomulyo Village is one of the villages in Jember Regency and there is still village development that has not been realized, thus hampering community activities. The aim of this research is to determine the process of preparing the RKP for Harjomulyo village. This research uses descriptive qualitative research. The results of this research are that the lack of community participation and awareness in efforts to build and maintain village facilities also becomes an obstacle in creating a more advanced village. The limitations of infrastructure development are also influenced by various other influencing factors.

Keyword : Implementation, RKPDDes, Village Development

1. Pendahuluan

Kualitas hidup masyarakat desa, termasuk perlindungan dan keselamatan dari bahaya, adalah prioritas utama dalam pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan ini, perangkat desa harus menyusun rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana tersebut harus memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan desa, terutama desa kerajinan, dapat melibatkan

empat aspek utama: (i) pengembangan ekonomi lokal; (ii) pemberdayaan masyarakat; (iii) pembangunan infrastruktur dan peralatan; dan (iv) pengembangan kelembagaan (Utomo, 2021).

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat desa merupakan salah satu tahapan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, penyusunan RKP Desa menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan luas sekitar 1.563,078 hektar dan populasi lebih dari 10.000 jiwa, Desa Harjomulyo memiliki beragam kebutuhan pembangunan yang harus diakomodasi dalam perencanaan tahunan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi landasan hukum utama dalam penyusunan RKP Desa. Kedua regulasi ini mengharuskan desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (enam tahun) dan rencana kerja pemerintah tahunan. Rencana ini harus disusun berdasarkan partisipasi aktif masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan Kota/Kabupaten (Putra & Mursyidah, 2023).

Desa Harjomulyo terdiri dari lima dusun, yaitu Jalinan, Sumberlanas, Sumberlanas Barat, Sumberlanas Timur, dan Sumberwadung. Masing-masing dusun memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, sehingga proses penyusunan RKP Desa harus mampu mengakomodasi perbedaan ini (Rohmah, 2022). Selain itu, desa ini terletak pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan antara 200-220 mm per tahun, yang mempengaruhi kondisi pertanian dan infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dikumpulkan dan dijadikan dasar perencanaan. Namun, di Desa Harjomulyo, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah, sehingga perencanaan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat (Putri et al, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan RKP Desa Harjomulyo adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam perencanaan dan penganggaran. Perangkat desa sering kali kurang memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang memadai untuk menyusun rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan berjalan dengan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Harjomulyo pada tahun 2023 menunjukkan perbedaan signifikan antara anggaran yang diperoleh dan realisasi anggaran. Dari total pendapatan sebesar Rp 2.593.216.898,00, realisasi anggaran hanya mencapai Rp 471.727.200,00. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran dan implementasi program-program pembangunan yang direncanakan (Website Desa Harjomulyo, 2024).

Selain itu, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas dalam RKP Desa Harjomulyo. Namun, banyak program pembangunan yang sulit direalisasikan karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan dana, masalah teknis, dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga menimbulkan ketimpangan antar dusun di desa tersebut. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi fokus utama dalam RKP Desa Harjomulyo. Potensi ekonomi desa, seperti pertanian dan kerajinan, perlu dikembangkan

lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, upaya ini tidak akan berhasil optimal.

Penelitian ini akan menyoroti proses penyusunan RKP Desa Harjomulyo dengan melihat berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan RKP, termasuk partisipasi masyarakat, kapasitas perangkat desa, serta dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyusunan RKP Desa Harjomulyo di masa mendatang. Melalui penelitian mendalam tentang "Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember," diharapkan dapat ditemukan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam menyusun RKP yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu pertama oleh Moh Rizki Maulana dan Muhammad Abrar pada tahun 2022 yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan RKP Desa (Studi Kasus Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dalam proses penyusunan RKP Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Penelitian kedua merupakan penelitian dari Salma Dzalika Rahmadya pada tahun 2022 dengan judul "Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan Kendala berupa peserta tidak tepat waktu, terdapat juga usulan bermasalah, dan sedikit pemuda yang terlibat dalam Murenbangdes. Penelitian ketiga merupakan penelitian dari Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana Desa Sengkubang dinilai efektif sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 2016 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Sengkubang juga digolongkan sebagai kategori desa mandiri.

Konsep Perumusan Kebijakan

Rumusan kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa haruslah didasarkan pada prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari pengumpulan aspirasi hingga pengambilan keputusan. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi wadah utama untuk menampung masukan dan saran dari masyarakat, memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal. Kebijakan ini juga menuntut adanya dokumentasi dan publikasi yang jelas mengenai proses dan hasil Musrenbangdes, agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan (Azura et al, 2024).

Kebijakan lainnya adalah peningkatan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah desa perlu diberdayakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi RKP Desa. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, teknik analisis kebutuhan, serta strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis perencanaan tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan desa agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan (Suryaningsih et al, 2023).

Selain itu, kebijakan harus memperhatikan sinkronisasi antara rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam perumusan kebijakan:

1. Identifikasi Masalah (Problem Identification): Langkah pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang ingin dipecahkan. Ini melibatkan analisis terhadap kondisi yang ada dan penentuan apakah masalah tersebut memerlukan intervensi kebijakan (Darsyah & Chanifudin, 2020).
2. Perumusan Agenda (Agenda Setting): Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan. Ini berarti mengupayakan agar masalah tersebut diakui dan dianggap penting oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan.
3. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation): Tahap ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif solusi atau opsi kebijakan untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Ini termasuk analisis dampak, manfaat, dan biaya dari masing-masing alternatif.
4. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption): Pada tahap ini, para pembuat keputusan (misalnya, legislatif, eksekutif) memilih dan mengesahkan opsi kebijakan yang dianggap paling sesuai. Proses ini sering kali melibatkan negosiasi dan kompromi.
5. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation): Setelah kebijakan diadopsi, tahap berikutnya adalah pelaksanaannya. Ini mencakup penerapan rencana kebijakan melalui program-program dan tindakan spesifik, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
6. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation): Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan. Ini melibatkan pengukuran dampak kebijakan terhadap masalah yang ingin diselesaikan dan penilaian terhadap proses implementasi.
7. Revisi atau Terminasi Kebijakan (Policy Revision or Termination): Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi untuk meningkatkan efektivitasnya atau dihentikan jika ternyata tidak berhasil atau tidak lagi relevan (Darsyah & Chanifudin, 2020).

2.2.2 Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan publik melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Mansur, 2021). Berikut adalah beberapa aspek utama:

1. Aspek Politik: Faktor politik sangat mempengaruhi kebijakan publik. Ini mencakup ideologi politik yang dianut oleh pemimpin dan partai politik, dinamika kekuasaan, serta tekanan dari kelompok lobi dan pemilih. Misalnya,

kebijakan fiskal sering kali dipengaruhi oleh janji kampanye dan kepentingan politis untuk mendapatkan dukungan elektoral.

2. Aspek Ekonomi: Kondisi ekonomi suatu negara atau daerah, seperti anggaran, sumber daya, inflasi, pengangguran, dan tingkat pertumbuhan ekonomi, sangat menentukan arah kebijakan publik. Analisis biaya-manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah pertimbangan penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi.
3. Aspek Sosial: Faktor sosial seperti demografi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat juga mempengaruhi kebijakan publik. Masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan memerlukan kebijakan yang inklusif dan adil. Tuntutan masyarakat terhadap hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial sering kali memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan mereka.
4. Aspek Teknologi: Perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru bagi pembuat kebijakan. Kebijakan tentang privasi data, keamanan siber, dan inovasi teknologi menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Aspek Lingkungan: Kondisi lingkungan, termasuk isu-isu seperti perubahan iklim, kelestarian sumber daya alam, dan polusi, sangat mempengaruhi kebijakan publik. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan untuk menangani masalah lingkungan dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat (Mansur, 2021).

Dengan memahami dan mempertimbangkan semua aspek ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Konsep Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) dan Pembangunan Desa

Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. RKPDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa serta analisis kebutuhan dan potensi desa. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan sumber daya, baik anggaran maupun tenaga kerja, untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa (Ariadi, 2019).

RKPDes memuat berbagai informasi, antara lain visi dan misi pembangunan desa, tujuan pembangunan, strategi pencapaian, serta rincian program dan kegiatan beserta anggarannya. Dokumen ini juga dapat mencakup proyek-proyek infrastruktur, program kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan berbagai bidang lain yang menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Pratama, 2023).

Penyusunan RKPDes melibatkan proses partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, baik melalui musyawarah desa, forum-forum diskusi, konsultasi publik, maupun pengumpulan masukan dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, RKPDes diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat serta menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa (Suprastiyo, 2019).

Teori Implementasi Kebijakan Jan Marse

Teori implementasi kebijakan Jan Marse menekankan empat dimensi kunci yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi (Ratu, 2021).

1. Informasi: Teori ini menyoroti pentingnya akses terhadap informasi yang akurat dan relevan dalam proses implementasi kebijakan. Informasi yang tepat waktu dan akurat membantu para pelaku kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi implementasi yang efektif.
2. Isi Kebijakan: Teori ini menekankan bahwa isi kebijakan harus jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana. Kebijakan yang kompleks atau ambigu cenderung sulit untuk diterapkan secara efektif, sehingga perlu dipastikan bahwa isi kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh para pelaksana.
3. Dukungan Masyarakat: Teori ini mengakui pentingnya dukungan dari masyarakat dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan ini dapat berupa partisipasi aktif dalam proses implementasi, penerimaan terhadap kebijakan, serta ketersediaan sumber daya manusia dan finansial dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
4. Pembagian Potensi: Teori ini juga menyoroti pentingnya pembagian potensi atau sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang terampil, serta infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Dengan memperhatikan empat dimensi ini, para pembuat kebijakan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan mereka dengan memastikan akses terhadap informasi yang memadai, merancang kebijakan yang dapat dijalankan dengan baik, mendapatkan dukungan masyarakat yang kuat, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif (Ratu, 2021).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu bulan September – Oktober 2023. Lokasi Penelitian ini yaitu di Kantor Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masih terdapat masalah di Desa Harjomulyo dimana masih terdapat pembangunan desa yang belum terealisasi sehingga menghambat aktifitas masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data primer pada penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Dalam melakukan pengabsahan data, penelitian ini menggunakan tiga cara triangulasi menurut Sugiyono (2015), yaitu berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan Desa, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus mengikuti serangkaian tahapan tertentu. Tahapan tersebut mencakup: (1) Penyusunan perencanaan (2) Pembentukan tim penyusun (3) Pencermatan pagu indikatif (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pada tahap awal dalam penyusunan RKP Desa, langkah pertama adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musyawarah ini harus diselenggarakan paling lambat bulan Juni setiap tahunnya. Selama musyawarah, fokus utama adalah melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, menyetujui hasil peninjauan kembali tersebut, dan membentuk tim verifikasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Setelah melalui tahapan musyawarah Desa, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim penyusun RKP Desa. Tim ini bertanggung jawab untuk menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah dan menyesuaikannya dengan pagu indikatif Desa serta program/kegiatan yang masuk ke Desa. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara tim penyusun, pemerintah Desa, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi RKP Desa dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Desa.

Dalam penyusunan rancangan RKP Desa, penting untuk melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa guna memastikan bahwa RKP Desa tersebut selaras dengan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Desa. Langkah selanjutnya adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa guna menyusun RKP Desa secara kolektif dan partisipatif. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan RKP Desa dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat serta menjadi landasan yang kokoh untuk pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Tabel 4.2 Penyusunan RKP

o.	Kegiatan	Sasaran	A nggaran	Waktu Pelaksanaan
	Pembanguna n Jalan Desa	Meningkat kan Aksesibilitas	5 0.000.000	Januari - Maret
	Rehabilitasi Irigasi	Peningkata n Produksi	3 0.000.000	April - Juni
	Pembanguna n Posyandu Baru	Peningkata n Kesehatan	2 0.000.000	Juli - Agustus
	Pelatihan Pertanian	Peningkata n Kapasitas Petani	1 5.000.000	September - Oktober
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Pengemba ngan Potensi Desa	2 5.000.000	November - Desember

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara terkait proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo, terdapat sejumlah temuan yang menyoroti aspek penting dalam pembangunan desa. Pertama-tama, partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan RKP menjadi faktor kunci dalam memastikan kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini tercermin dari peran serta berbagai elemen masyarakat, seperti musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan, dan Lembaga Ketahanan Desa (LKD), yang secara aktif terlibat dalam menyusun RKP. Dalam konteks ini, adanya forum musyawarah dan partisipasi yang inklusif memberikan jaminan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan tercermin dari aspirasi dan kebutuhan langsung masyarakat.

Kedua, pelaksanaan pelatihan secara rutin, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan penyusunan RKP, menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk menyusun RKP yang responsif dan efektif. Melalui pelatihan ini, diharapkan perangkat desa dapat lebih siap dan terampil dalam mengelola sumber daya keuangan desa serta menyusun RKP yang responsif terhadap kebutuhan dan perubahan regulasi.

Ketiga, terdapat tantangan dalam penyesuaian prioritas pembangunan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah serta dinamika situasi lokal. Fleksibilitas dalam merespon perubahan tersebut menjadi kunci dalam memastikan kesinambungan dan relevansi RKP dengan kondisi aktual desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa harus memiliki mekanisme yang responsif dan adaptif untuk memastikan bahwa RKP tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan yang terjadi.

Keempat, pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun RKP menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan pembangunan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan desa.

Kelima, proses penyusunan RKP di Desa Harjomulyo bukan hanya sebagai wadah untuk merumuskan program-program pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga desa. Melalui keterlibatan aktif dan kolaboratif ini, diharapkan tercipta pembangunan yang lebih responsif, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat desa.

Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan RKP Di Desa Harjomulyo

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) di Desa Harjomulyo melibatkan beragam pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Pertama-tama, peran utama dimiliki oleh Pemerintah Desa Harjomulyo itu sendiri, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan RKP. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta melibatkan aktif partisipasi dari seluruh warga masyarakat dalam proses perencanaan tersebut. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa RKP mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari penduduk Desa Harjomulyo.

Selain itu, peran instansi pemerintah yang berada di tingkat kabupaten juga turut serta dalam proses penyusunan RKP Desa Harjomulyo. Instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan bimbingan teknis dan saran yang mendukung penyusunan RKP yang

terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah kabupaten memastikan bahwa RKP tidak hanya memperhitungkan kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan yang lebih luas di tingkat kabupaten. Dengan keterlibatan semua pihak yang terkait, proses penyusunan RKP Desa Harjomulyo menjadi representatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Harjomulyo, sebagai contoh, telah dibentuk dengan jumlah 11 orang. Pembentukan tim tersebut dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Harjomulyo saat musyawarah Desa. Agenda musyawarah tersebut mencakup: (a) meninjau ulang dokumen RPJM Desa, (b) menyetujui hasil peninjauan ulang dokumen RPJM Desa, dan (c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, serta pembentukan tim penyusun RKP Desa.

Setiap kali terjadi pergantian kepala desa, kepala desa dan staf administrasi desa mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang merinci program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku selama periode 6 tahun. RKP Desa digunakan sebagai landasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Proses pembentukan tim penyusun RKP Desa dimulai setelah Musyawarah Desa (Musdes) selesai dilaksanakan. Tim ini terdiri dari perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat yang dipilih untuk berpartisipasi dalam menyusun RKP Desa.

Dukungan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo

Dukungan masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo. Partisipasi aktif dan kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, menjadi landasan utama dalam menentukan arah pembangunan desa. Melalui Musyawarah Desa (Musdes), wadah utama di mana aspirasi, kebutuhan, dan prioritas masyarakat dihimpun, proses penyusunan RKP Desa menjadi lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Musyawarah Desa, berbagai masukan dan saran dari masyarakat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah desa dalam menetapkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Proses ini memastikan bahwa RKP Desa tidak hanya mencerminkan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi cerminan dari keinginan dan aspirasi nyata masyarakat Desa Harjomulyo. Dukungan yang kuat dari masyarakat menjadi modal utama bagi keberhasilan implementasi RKP Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara menyeluruh.

Selain itu, dukungan masyarakat juga tercermin dalam pembentukan tim penyusun RKP Desa. Perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat berperan aktif dalam merumuskan program-program yang relevan dan dapat mendukung pembangunan Desa Harjomulyo secara keseluruhan. Melalui kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, RKP Desa dapat disusun dengan lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi yang ada di tingkat lokal.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam penyusunan RKP Desa juga membantu memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa. Hal ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional antara masyarakat dan program pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi serta keberlanjutan implementasi program-program yang telah dirumuskan dalam RKP Desa.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, diharapkan implementasi RKP Desa dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan seluruh warga Desa Harjomulyo. Kesenambungan pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui keterlibatan aktif dan dukungan bersama antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan RKP Desa.

Kesuksesan pelaksanaan program pembangunan desa oleh pemerintah desa sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang berlangsung. Peran serta masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di desa. Konsep ini sejalan dengan teori pembangunan yang diajukan oleh Siagian (dalam Riyadi, 2004), yang mengartikan pembangunan sebagai upaya atau serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas sebagai bagian dari pembinaan bangsa.

5. Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam sektor Pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024, mengacu pada indikator perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pengurus desa dan sejumlah masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RKPDDes. Tujuan utama RKPDDes adalah mewujudkan visi pembangunan yang diharapkan. Hambatan lebih lanjut dalam mengembangkan desa yang lebih maju adalah kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun dan memelihara fasilitas desa. Masih banyak lagi elemen pendukung yang juga berdampak pada keterbatasan pembangunan infrastruktur.

Daftar Referensi

- Ariadi, a. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Azura, a., fitriah, m., nursadiyah, n. F., ariesty, s. M., nandari, t., & fatkhuri, f. (2024). Analisis demokratisasi desa era reformasi (studi kasus: desa tanah datar, kalimantan timur). *Jurnal administrasi pemerintahan desa*, 5(1), 15-15.
- Darsyah, s., & chanifudin, c. (2020). Kebijakan dalam pendidikan. *At-thullab: journal of islamic studies*, 1(1), 116-133.
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). Agile governance sebagai bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah. *Dr. Diss. Univ. Muhammadiyah Jember*.
- Mansur, j. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-tawassuth: jurnal ekonomi islam*, 6(2), 324-334.
- Maulana, A. (2023). Kinerja SDM Aparatur Melalui Pelayanan Administrasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(1), 10-10.

- Maulana, m. R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rkp desa (studi kasus desa bayeun kecamatan rantau selamat kabupaten aceh timur). *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi pembangunan*, 7(2), 141-151
- Pratama, d. I. C., & ma'ruf, m. F. (2023). Analisis rencana kerja pemerintah (rkp) desa gading watu kecamatan menganti kabupaten gresik tahun 2022. *Publika*, 2243-2256.
- Putra, k. W., & mursyidah, l. (2023). Perencanaan pembangunan infrastruktur desa kalidawir kecamatan tanggulangin kabupaten sidoarjo. *Journal of governance and local politics (jglp)*, 5(2), 245-253.
- Putri, a., harimisa, g. S., arista, j., & supeno, s. (2023). Pelatihan ecoprint berbasis potensi alam untuk meningkatkan life-skill perempuan desa harjomulyo. *Dedication: jurnal pengabdian masyarakat*, 7(2), 275-282.
- Ratu, a., ansyari, m. I., & parawu, h. E. (2021). Implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di desa bonerte kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar. *Kajian ilmiah mahasiswa administrasi publik (kimap)*, 2(6), 2071-2084.
- Sugiyono, d. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Penerbit alfabeta,.
- Suprastiyo, a. (2019). Implementasi penyusunan rencana kerja (rkp) desa (studi di desa trucuk kecamatan trucuk kabupaten bojonegoro). *Jurnal ilmiah manajemen publik dan kebijakan sosial*, 2(2).
- Utomo, b. W., & purnamasari, s. M. (2021, june). Potret badan usaha milik desa (bumdes) sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa. In *prosiding seminar nasional ekonomi pembangunan* (vol. 1, no. 1, pp. 65-72).
- Wicaksono, I., Bahtiar, B., & Maulana, A. (2021). Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di Randuagung Sumberjambe Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(1), 9-14.

Referensi Lain

Website Desa Harjomurlyo-Kabupaten Jember, 2024